

## SEGMENT AKUN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

AKUN	PENJELASAN
<b>42</b>	<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>
<b>421</b>	<b>PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM</b>
<b>4211</b>	<b>PENDAPATAN MINYAK BUMI</b>
<b>42111</b>	<b>Pendapatan Minyak Bumi</b>
421111	Pendapatan Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bagian Pemerintah dari penjualan minyak bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99).
<b>4212</b>	<b>PENDAPATAN GAS BUMI</b>
<b>42121</b>	<b>Pendapatan Gas Bumi</b>
421211	Pendapatan Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bagian Pemerintah dari penjualan gas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (999.99).
<b>4213</b>	<b>PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>
<b>42132</b>	<b>Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara – Eksplorasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan eksplorasi pertambangan Mineral dan Batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan operasi produksi pertambangan Mineral dan Batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan usaha pertambangan di bidang Mineral dan Batubara dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42133</b>	<b>Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan tembaga. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan emas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan perak. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan nikel. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan timah. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan komoditi tambang selain batubara, tembaga, emas, perak, nikel, timah dan besi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42134</b>	<b>Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)</b>
421341	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari bagian pemerintah atas keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>4214</b>	<b>PENDAPATAN KEHUTANAN</b>
<b>42141</b>	<b>Pendapatan Dana Reboisasi</b>
421411	Pendapatan Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Dana Reboisasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029)
<b>42142</b>	<b>Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan</b>
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42143</b>	<b>Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)</b>
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH) antara lain Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IIUPHHK-HA) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IIUPHHK-HTR).Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).

AKUN	PENJELASAN
<b>42144</b>	<b>Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan</b>
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>4215</b>	<b>PENDAPATAN PERIKANAN</b>
<b>42152</b>	<b>Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan</b>
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari izin untuk melaksanakan pengusahaan perikananbidang perikanan tangkap antara lain Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI)
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari izin untuk melaksanakan pengusahaan perikananbidang pembudidayaan ikan antara lain Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan dan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM).
<b>42153</b>	<b>Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan</b>
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dalam rangka penangkapan ikan antara lain Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
<b>4216</b>	<b>PENDAPATAN PANAS BUMI</b>
<b>42162</b>	<b>Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi</b>
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari setoran bagian pemerintah setelahdikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan. Masuk BagianAnggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99)
<b>42163</b>	<b>Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi</b>
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan eksplorasi pengusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan operasi produksi pengusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42164</b>	<b>Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi</b>
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pengusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>422</b>	<b>PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)</b>
<b>4221</b>	<b>PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN</b>
<b>42213</b>	<b>Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN</b>
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan bagian Pemerintah dari laba BUMN Perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan bagian Pemerintah dari laba BUMN Non Perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
<b>42214</b>	<b>Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan</b>
422141	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Laba dari Investasi pada BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Laba dari Investasi pada BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
<b>4222</b>	<b>PENDAPATAN DARI KND LAINNYA</b>
<b>42221</b>	<b>Pendapatan dari Surplus Lembaga</b>
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.
422212	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi bagian Pemerintah.
422213	Pendapatan dari Surplus Lembaga Penjamin Simpanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang menjadi bagian Pemerintah.
422219	Pendapatan dari Surplus Lembaga Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus lembaga lainnya yang menjadi bagian Pemerintah.
<b>425</b>	<b>PENDAPATAN PNBP LAINNYA</b>
<b>4251</b>	<b>PENDAPATAN DARI PENJUALAN, PENGELOLAAN BMN, DAN IURAN BADAN USAHA</b>
<b>42511</b>	<b>Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang</b>
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari penjualan produksi batubara bagian pemerintah di luar royalti. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).

AKUN	PENJELASAN
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya yang tidak berasal dari hasil kegiatan penelitian dan/atau pengembangan. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penjualan dokumen lelang. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni
	Digunakan untuk mencatat pendapatan penjualan cadangan beras pemerintah dalam rangka menstabilkan harga beras di pasaran
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan selain kelompok pendapatan atas penjualan-penjualan di atas dan tidak berasal dari hasil kegiatan penelitian/pengembangan, antara lain berasal dari hasil penjualan produk ekonomi kreatif, penjualan obat-obatan dan hasil farmasi. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
<b>42512</b>	<b>Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN</b>
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah negara, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
	Digunakan untuk mencatat pendapatan kompensasi sewa beli rumah negara golongan III. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033) .
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Tanah, Gedung dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar jalan, irigasi dan jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
<b>42513</b>	<b>Pendapatan dari Pemanfaatan BMN</b>

AKUN	PENJELASAN
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan termasuk pendapatan sewa rumah dinas. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang bisa ada di semua Kementerian/Lembaga.
425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
<b>42514</b>	<b>Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang</b>
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS
	Digunakan untuk mencatat pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang berasal dari KKKS, baik masih berada dalam penguasaan KKKS maupun yang telah diserahkan kepada BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
	Digunakan untuk mencatat pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B, baik masih berada dalam penguasaan Kontraktor PKP2B maupun yang telah diserahkan kepada BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

AKUN	PENJELASAN
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan aset properti/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dicatat pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus( 999.99)
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari aset saham dan surat berharga lain eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa dividen, bunga dan denda keterlambatan. Dicatat pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus( 999.99)
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas kompensasi aset bekas milik Asing/Tionghoa.
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengelolaan barang pada pengelola barang selain yang berasal dari KKKS, Kontraktor PKP2B, aset eks BLBI dan aset bekas milik asing/tionghoa.
<b>42515</b>	<b>Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi</b>
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
<b>42516</b>	<b>Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas</b>
425161	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang timbul akibat selisih harga beli BBM Pemerintah dari Badan Usaha (harga patokan) lebih rendah/kecil dari harga jual BBM Pemerintah kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam Perpres. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99)
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari selisih antara nilai minyak mentah DMO / Domestic Market Obligation dengan harga ICP / Indonesian Crude Price dengan DMO Fee. Nilai minyak mentah DMO adalah hasil penjualan minyak mentah bagian KKKS (Kontraktor Kontrak kerja Sama) diserahkan kepada Pemerintah atau dibeli Pemerintah. Sedangkan DMO Fee adalah pembayaran atau harga beli Pemerintah atas penyerahan minyak mentah DMO bagian KKKS. Penerimaan ini bersifat kontijensi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99).
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha hulu migas antara lain penerimaan bonus dari KKKS, transfer material, dan firm commitment
<b>42517</b>	<b>Pendapatan Iuran Badan Usaha</b>
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM.
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari luran Badan Usaha dari kegiatan usaha niaga dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
<b>4252</b>	<b>PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM</b>
<b>42521</b>	<b>Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum</b>
425211	Pendapatan Paspor
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia antara lain berupa paspor biasa, paspor pengganti, surat perjalanan laksana paspor, dan pas lintas batas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013)
425212	Pendapatan Visa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Visa, antara lain berupa visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013)
425213	Pendapatan Izin Keimigrasiandan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> )
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan pemberian Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> ) antara lain berupa izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013)
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan keimigrasian selain paspor, visa, dan izin keimigrasiandan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> ), antara lain berupa biaya beban keimigrasian, <i>Smart Card</i> , pembuatan Surat Keterangan Keimigrasian, pembuatan dan penggantian Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC) /APEC <i>Business Travel Card</i> (ABTC), pemberian fasilitas AFFIDAVIT. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013)
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan fidusia antara lain berupa pendaftaran jaminan fidusia dan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Badan Hukum antara lain berupa pendirian badan usaha, yayasan, dan perseroan. Masuk Bagian AnggaranKementerian Hukum dan HAM (BA 013)
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa hukum selain pelayanan fidusia dan pelayanan badan hukum, antara lain berupa Pendapatan dari pelayanan perdata umum, notariat, harta peninggalan, pengambilan sidik jari (daktiloskopi), partai politik, kewarganegaraan dan perwarganegaraan RI. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013)
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan atas kekayaan intelektual antara lain berupa hak cipta, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan indikasi geografis, dan Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya



AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan dan administrasi hukum selain pelayanan keimigrasian, pelayanan jasa hukum dan pelayanan kekayaan intelektual, antara lain kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
<b>42522</b>	<b>Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri</b>
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari visa Republik Indonesia di luar negeri. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari paspor Republik Indonesia di luar negeri, termasuk Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengurusan dokumen konsuler. Antara lain pengesahan tandatangan/legalisasi salinan dokumen, surat keterangan jalan, surat keterangan usaha/ bisnis dan buku pengenalan diri (ID Book). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pelayanan pada KDEI di Luar Negeri, meliputi pendapatan paspor, visa, fasilitas keimigrasian (affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda, Dokumen Konsuler, dan pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh KDEI. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan lainnya di luar negeri antara lain pendapatan fasilitas keimigrasian (affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda, Surat Keterangan Keimigrasian, pelayanan kepelautan, pelayanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, dan pelayanan lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari administrasi di luar negeri antara lain pendapatan cicilan Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR), pengembalian <i>Value Added Tax</i> (VAT), dan pendapatan administrasi lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
<b>42523</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi</b>
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengesahan surat di bawah tangan. Masuk ke Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (BA 005).
425233	Pendapatan Ongkos Perkara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari ongkos perkara. Masuk Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005), Kejaksaan Agung (BA 006), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (093).

AKUN	PENJELASAN
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara.
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari lelang barang-barang gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara.
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil sitaan dan/atau temuan berupa barang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan selain dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006)
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana selain Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain berupa denda hasil tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006)
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kejaksaan dan peradilan lainnya, antara lain berupapendaftaran pengangkatan sita, hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil orang yang berhak, hasil pemulihan kerugian negara, hasil kerja sama di bidang hukum dengan negara lain, sisa panjar biaya perkara, dan hak redaksi, Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Mahkamah Agung (BA 005)
<b>42524</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang</b>
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang sitaan tindak pidana pencucian uang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil lelang barang rampasan tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).

AKUN	PENJELASAN
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil lelang barang rampasan tindak pidana korupsi dan hasil penjualan barang sita eksekusi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari denda hasil tindak pidana korupsi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari denda hasil tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian uang Negara tanpa putusan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnyayang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil sitaan dan/atau temuan berupa uang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan selain dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, antara lain berupa uang sitaan dari tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
<b>42525</b>	<b>Pendapatan Perizinan</b>
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas kompensasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (BA 026).
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan pengajuan Hak dan Perizinan di bidang pertanian antara lain berupa jasa pelayanan perlindungan varietas tanaman (PVT), jasa pendaftaran pupuk, jasa pendaftaran pestisida, jasa pendaftaran obat hewan, dan jasa sertifikasi obat hewan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018)
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), jasa pengujian dalam rangka persyaratan izin tanda pabrik dan izin tipe alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, izin usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan perizinan lainnya di bidang perdagangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090)
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan kefarmasian, perizinan alat kesehatan, izin edar alat kesehatan, dan izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (BA 024)
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dariperizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa iuran izin pemanfaatan kawasan, iuran izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi (IUPJL), penerbitan izin lingkungan, dan penerbitan izin pengendalian pencemaran air. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).

AKUN	PENJELASAN
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan selain perizinan Tenaga Kerja Asing, perizinan Pertanian, perizinan bidang perdagangan, perizinan bidang kesehatan dan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain berupa perizinan undian berhadiah serta perizinan penelitian, perizinan pelaksanaan reklamasi dan pengembangan bagi peneliti asing, dan iuran tahunan akibat penerapan hak.
<b>42526</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kepolisian I</b>
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425263	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425264	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Ujian Keterampilan Mengemudi sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerahsesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).

AKUN	PENJELASAN
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
<b>42527</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kepolisian II</b>
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melintasi batas negara Indonesiasesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melintasi batas negara Indonesiasesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledaksesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425274	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisiansesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Satuan Pengaman, yaitu penerbitan kartu anggota satuan pengaman, penerbitan ijazah satuan pengaman, dan penerbitan surat izin operasional badan usaha jasa pengamanan sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu dan Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Kepolisian Lainnya, termasuk pelayanan penyelenggaraan assesment center Polri sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).

AKUN	PENJELASAN
42528	<b>Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi</b>
425281	Pendapatan Akreditasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari akreditasi antara lain akreditasi pada Badan Standardisasi Nasional. Merupakan penerimaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga.
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari antara lain pendapatan dari sertifikasi benih, Jasa Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jasa Pengujian Benih Tanaman Kehutanan, Pengujian Bibit Tanaman Hutan, dan Jasa Laboratorium. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029)
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (BA 019) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi serta pelayanan teknis mesin.
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (BA 090) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian kalibrasi dan verifikasi, pelayanan inspeksi teknik, pelayanan teknis mesin, pelayanan teknis sertifikasi, serta jasa tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang memerlukan penanganan khusus.
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (BA 024) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi dan pelayanan teknis sertifikasi.
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033)
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian selain dari pengujian kendaraan bermotor, Sertifikasi, dan Kalibrasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (BA 022) antara lain meliputi sertifikasi angkutan penyeberangan lintas dalam negeri, sertifikasi kompetensi pengawakan angkutan umum, sertifikasi SDM perkeretaapian, sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian, penerbitan lisensi dan sertifikasi bidang transportasi udara, dan kalibrasi peralatan penerbangan.
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059)
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi selain di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perindustrian, perdagangan, kesehatan, dan pekerjaan umum, antara lain pengujian, sertifikasi,

AKUN	PENJELASAN
	kalibrasi, dan standardisasi di bidang tenaga nuklir dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
<b>4253</b>	<b>PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN</b>
<b>42531</b>	<b>Pendapatan Jasa Kesehatan</b>
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya selain dari BPJS Kesehatan.
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa karantina kesehatan antara lain karantina kapal yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024)
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa pemberian vaksin kesehatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari registrasi tenaga kesehatan, meliputi dokter, dokter gigi, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024)
<b>42532</b>	<b>Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan</b>
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pengawasan obat dan makanan antara lain berupa pendaftaran, sertifikasi, dan pengujian obat dan makanan. Masuk Bagian Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BA 063)
<b>42533</b>	<b>Pendapatan Jasa Karantina</b>
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa tindakan karantina pertanian dan peternakan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018)
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa tindakan karantina perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032)
<b>42534</b>	<b>Pendapatan Jasa Agraria</b>
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan survei, pengukuran, dan pemetaan, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, pelayanan pendaftaran tanah,

AKUN	PENJELASAN
	pelayanan informasi pertanahan, pelayanan lisensi, dan pelayanan di bidang pertanahan yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BA 056)
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan penetapan tanah obyek penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda (P3MB) sesuai Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BA 056)
<b>42535</b>	<b>Pendapatan Jasa Keagamaan</b>
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari hasil pelayanan Jasa Kantor Urusan Agama dari pencatatan nikah dan rujuk. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agama (BA 025)
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya, antara lain pendapatan dari pengelolaan asrama haji, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, dan pencetakan Al Qur'an. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agama (BA 025).
<b>4254</b>	<b>PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI</b>
<b>42541</b>	<b>Pendapatan Pendidikan</b>
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan pada Sekolah maupun Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP).
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Pendidikan di Sekolah maupun PTP yang dibayarkan selama masa pendidikan antara lain berupa uang kuliah tunggal, SPP, uang praktikum, cuti akademik, semester pendek, bimbingan karya ilmiah akhir, Praktik Kerja Lapangan, ujian remedial, dan ujian komprehensif
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah maupun PTP, antara lain kerjasama dengan instansi pemerintah/swasata dalam rangka kajian reorientasi pembangunan pedesaan, kajian dalam kebijakan strategis dalam pemetaan cluster sektor unggulan, kajian pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis ekonomi kreatif).
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan pendidikan pada Sekolah maupun PTP selain pendapatan ujian masuk/seleksi masuk pendidikan, pendapatan biaya pendidikan, dan pendapatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Antara lain berupa wisuda, kartu perpustakaan, penjualan hasil praktik pendidikan, dan pendapatan <i>try out</i> .
<b>42542</b>	<b>Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya



AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya di berbagai Kementerian/Lembaga selain layanan pendidikan dan/atau pelatihan serta assessment dan sertifikasi kompetensi. Antara lain berasal dari <i>assessment center</i> dan psikometri, sertifikasi kepabeanaan,sertifikasi <i>welding</i> , jasa registrasi kompetensi nasional bidang lingkungan hidup, dan sertifikasi penanggulangan bencana.
<b>42543</b>	<b>Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek</b>
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek, merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga, antara lain berupa pengukuran debit air permukaan menggunakan current meter type propeler OTT C2 (Jasa Instrumentasi Peralatan Lapang).
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Survei dan Pemetaan di lingkungan Kementerian/Lembaga, antara lain pengolahan data sosial ekonomi pertanian, jasa survey dan pemetaan dalam rangka survey hidro oseanografi,
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.Masuk Bagian Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BA 075)
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hasil Penelitian/Riset dan hasil Pengembangan Iptek. merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga, antara lain pendapatan dari laboratorium bank gen.
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hasil Survei dan Pemetaan di lingkungan Kementerian/Lembaga, antara lain peta laut navigasi, buku nautis, peta navigasi elektronik.
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual
	Digunakan untuk mencatat pendapatan royalti atas kekayaan intelektual. Merupakan penerimaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga, antara lain pendapatan royalti dari kekayaan intelektual yang berasal dari alih teknologi hasil litbang kesehatan.
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Penelitian/Riset, Survei, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya, antara lain jasa penggunaan peralatan survey dan pemetaan, jasa penimbangan peralatan nautika dan tiket masuk kebun raya dan balai konservasi tumbuhan.
<b>42545</b>	<b>Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan</b>
425451	Pendapatan Museum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari museum antara lain berupa tiket masuk museum dan pameran. Merupakan penerimaan yang (bisa) ada di Kementerian/Lembaga, antara lain museum Basoeki Abdullah, Museum Nasional, museum Sumpah Pemuda, museum geologi.
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kegiatan di bidang sejarah dan kebudayaan lainnya antara lain kerja sama pengelolaan cagar budaya (contoh: Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Pawon, dan Candi Mendut).
<b>4255</b>	<b>PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
<b>42551</b>	<b>Pendapatan Jasa Transportasi</b>
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa pengujian kendaraan bermotor antara lain berupa uji tipe kendaraan, uji sampel kendaraan dan penerbitan surat sertifikat uji tipe (SUT) serta surat registrasi uji tipe (SRUT).Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri antara lain berupa jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan orang, penggunaan sarana dan prasarana di pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa navigasi pelayaran antara lain berupa penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran, pelayanan jasa telekomunikasi pelayaran, pelayanan jasa salvage dan pekerjaan bawah air.Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerimaan uang perkapalan dan kepelautan antara lain berupa surat pengukuran kapal, dokumen kepelautan, dan pengawasan barang berbahaya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan di bandar udara antara lain berupa pelayanan jasa penumpang pesawat udara, pelayanan jasa pendaratan penempatan dan penyimpanan pesawat udara, jasa kargo dan pos pesawat udara, penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara serta penerbitan izin masuk daerah keamanan terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa navigasi penerbangan. antara lain <i>terminal navigation charge, enroute charge dan overflying</i> .Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari konsesi di bidang transportasi, antara lain konsesi jasa kepelabuhanan dan konsesi jasa kebandarudaraan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan di bidang transportasi selain pengujian kendaraan bermotor, penggunaan prasarana perkeretaapian, jasa

AKUN	PENJELASAN
	<p>kepelabuhanan, jasa navigasi pelayaran, jasa perkapalan dan kepelautan, jasa kebandarudaraan, jasa navigasi penerbangan, dan pendapatan dari konsesi bidang transportasi.</p> <p>Penerimaan Jasa Transportasi Lainnya antara lain berupa penerbitan izin angkutan jalan, penerbitan izin bidang perkeretaapian, penerbitan Surat izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), dan penerbitan izin bidang angkutan udara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).</p>
<b>42552</b>	<b>Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika</b>
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059)
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Pos. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059)
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059)
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengelolaan Nama Domain Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059)
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059)
<b>42553</b>	<b>Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik</b>
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (BA 116)
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Non Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (BA 116)
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (BA 117)
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Non Siaran.Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (BA 117)
<b>4256</b>	<b>PENDAPATAN JASA LAINNYA</b>
<b>42561</b>	<b>Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>
425611	Pendapatan Wisata Alam
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari wisata alam di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam, pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam, pungutan jasa kegiatan wisata alam, dan karcis masuk di kawasan suaka alam (KSA), kawasan pariwisata alam (KPA) dan taman buru (TB). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029)
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari iuran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pembayarannya dilakukan secara periodik, antara lain berupa iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan, pungutan usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pungutan usaha pemanfaatan air (PUPA), dan pungutan usaha pemanfaatan energi air (PUPEA). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029)
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa di bidang lingkungan hidup dan kehutanan selain pendapatan wisata alam, dan pendapatan iuran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang, hasil silvopastoral system, hasil silvofishery system, penerbitan rekomendasi pengangkutan dan registrasi bahan berbahaya dan beracun (B3), pendapatan dari pengumpulan benih dan anak dan transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42562</b>	<b>Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan</b>
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan
	Pendapatan dari pelayanan di pelabuhan perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032)
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan selain Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan, antara lain berupa pungutan dari penggunaan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032)
<b>42569</b>	<b>Pendapatan Jasa Lainnya</b>
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kegiatan pengawasan dan/atau pemeriksaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga antara lain berupa jasa inspeksi, jasa surveilans dan jasa audit.
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga, antara lain jasa tenaga ahli, jasa perpustakaan, jasa rancang bangun dan perkerjasama, dan jasa konsultasi.

AKUN	PENJELASAN
425693	Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa layanan jalan tol. Masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033).
425694	Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)
	Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033)
425699	Pendapatan Jasa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi
<b>4257</b>	<b>PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b>
<b>42571</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>
425711	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
425712	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari BPPN yang bersumber dari investasi/ pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian piutang tersebut di atas.
425714	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang berasal dari pemberian kredit pemerintah termasuk kredit investasi pemerintah dan kredit bidang perkebunan dan kehutanan.
425715	Pendapatan Komitmen Penerusan Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari biaya komitmen yang timbul akibat penerusan pinjaman, merupakan transaksi BA BUN Satker Direktorat SMI.
425716	Pendapatan Bunga Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga transaksi kredit program.
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan
	Digunakan untuk mencatat PNBPN yang berasal dari bunga dari pengelolaan rekening pembangunan hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
425719	Pendapatan Bunga Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga selain yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga lainnya.
<b>42572</b>	<b>Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i></b>
425721	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih <i>carrying value</i> Obligasi yang dibeli kembali dengan <i>clean price</i> yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali Obligasi ( <i>buyback</i> ). <i>Carrying Value</i> Obligasi ialah nominal Obligasi setelah dikurangi atau ditambah <i>unamortized discount</i> atau premium.
425722	Pendapatan dari Transaksi <i>Security Lending</i>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Transaksi <i>Security Lending</i> .
425723	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing.
425724	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang.
425725	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valuta Asing Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valas Jangka Panjang.
<b>42573</b>	<b>Pendapatan Premium atas Obligasi Negara</b>
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Rupiah yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SUN yang diterbitkan.
425732	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SUN yang diterbitkan.
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Rupiah yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SBSN.
425734	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SBSN.
<b>42574</b>	<b>Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara</b>
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas imbal jasa penjaminan infrastruktur.
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Selisih Harga SBN.
425743	Pendapatan Kupon SBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan atas Kupon SBN.

AKUN	PENJELASAN
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas transaksi <i>reverse repo</i> .
425745	Pendapatan Fee atas Transaksi Security Lending SUN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas SUN yang dipinjamkan kepada Dealer Utama. Masuk Bagian Anggaran 999.01 (Sistem Akuntansi Utang Pemerintah).
425746	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan lain-lain atas rekening tujuan tertentu.
<b>42575</b>	<b>Pendapatan dari Selisih Kurs</b>
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
	Digunakan untuk mencatat untung selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan
	Digunakan untuk mencatat realisasi kentungan selisih kurs uang persediaan pada seluruh Kementerian/Lembaga.
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
	Selisih positif transaksi belanja dalam valuta asing antara resume tagihan/invoice/SPP dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda.
<b>42576</b>	<b>Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening</b>
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari layanan jasa perbankan.
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Penerusan Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa bank akibat transaksi penerusan pinjaman.
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas biaya management fee, komitmen fee dan fee-fee yang terjadi karena transaksi penerusan pinjaman.
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah.
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penutupan rekening pemerintah.
<b>42577</b>	<b>Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara</b>
425771	Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari Bank Operasional atas penerbitan SP2D dalam rangka pengelolaan TSA. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Umum. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelaksanaan Treasury National Pooling. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Sentral. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425775	Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penempatan uang sebelum rekonsiliasi.
<b>42578</b>	<b>Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara</b>
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya penagihan secara paksa atas piutang pajak tidak tertagih. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA 015).
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas I yang dipungut oleh DJKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II yang dipungut oleh DJKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Pegadaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Masuk pendapatan Kementerian Keuangan (BA 015).
<b>42579</b>	<b>Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara</b>
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.



AKUN	PENJELASAN
<b>4258</b>	<b>PENDAPATAN DENDA</b>
<b>42581</b>	<b>Pendapatan Denda I</b>
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari pelaku usaha yang telah mendapatkan putusan tetap dari peradilan. Masuk Bagian Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (BA 108).
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda Administratif atas pelanggaran tidak mendaftar Prospektus dan Perjanjian Waralaba; Denda Administratif atas pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090)
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia. Merupakan pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury National Pooling
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury National Pooling. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas
	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa denda, bunga, dan penalti keterlambatan terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda administrasi atas Keterlambatan dan Kekurangan Penyetoran Bagian Pemerintah dari Pengusahaan Panas Bumi
<b>42582</b>	<b>Pendapatan Denda II</b>
425821	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).

AKUN	PENJELASAN
425822	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Penerusan Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Penerusan Pinjaman, merupakan transaksi BA BUN satker Direktorat SMI
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan penerimaan denda karena bank yang ditunjuk terlambat menyalurkan dana kredit program kepada pihak yang berhak menerima.
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk juga imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur KUMK.
425827	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Penerusan Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur Penerusan Pinjaman.
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan kompensasi sewa beli rumah negara golongan III.
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda/kompensasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa ganti rugi tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan (DPEH), denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, dan ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029)
<b>42583</b>	<b>Pendapatan Denda III</b>
425839	Pendapatan Denda Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda yang tidak termasuk ke dalam kelompok Pendapatan Denda I & II
<b>4259</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>
<b>42591</b>	<b>Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I</b>
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Modal TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL.
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Subsidi TAYL.
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Hibah TAYL.
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Bantuan Sosial TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Lain-lain TAYL.
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL.
<b>42592</b>	<b>Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II</b>
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL
<b>42593</b>	<b>Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan</b>
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai PNS yang sudah pensiun.
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Prajurit TNI/PNS Kemhan yang sudah pensiun.
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Anggota Polri/PNS Polri yang sudah pensiun.
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Pejabat Negara yang sudah pensiun.
<b>42599</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengembalian Uang Muka Gaji. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.

AKUN	PENJELASAN
425992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Pembayaran Premi dalam rangka Penjaminan Perbankan Nasional.
425993	Pendapatan Jasa Perbendaharaan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima Pemerintah dari Bank Umum atau PT Pos sebagai pengelola kas negara (Bank Operasional).
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi.
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penyetoran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak. Merupakan pendapatan BA 015.06 (Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan)
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN. Merupakan pendapatan BUN.
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
425998	Pendapatan dari Retur SP2D
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Retur SP2D yang disetorkan ke kas negara. Dibukukan pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain
	Merupakan pendapatan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.